



JELANG LIBURAN IMLEK DI BEIJING

IDN/ANTARA

Pekerja berada di atas mesin pengangkat barang memasang lampu lalu lintas dengan bentuk lampion menjelang liburan Tahun Baru Imlek, di tengah penyebaran penyakit virus korona (COVID-19), di Beijing, Tiongkok, Selasa (26/1).

Kasus Covid-19 Global Tembus 100 Juta, Dunia Kekurangan Vaksin

Saat ini negara-negara di penjuru dunia berjuang melawan varian baru dan kekurangan vaksin.

LONDON(IM) - Kasus virus korona global melampaui 100 juta pada Rabu (27/1), menurut penghitungan Reuters. Saat ini negara-negara di penjuru dunia berjuang melawan varian baru dan kekurangan vaksin.

Hampir 1,3% dari populasi dunia kini telah terinfeksi Covid-19, penyakit yang disebabkan virus korona baru. Selain itu, lebih dari 2,1 juta orang telah meninggal.

Rata-rata satu orang terinfeksi setiap 7,7 detik, sejak awal tahun. Sekitar 668.250 kasus telah dilaporkan setiap hari selama periode yang sama, dan tingkat kematian global mencapai 2,15%.

Negara-negara yang terkena dampak terburuk adalah Amerika Serikat (AS), India, Brasil, Rusia, dan Inggris, dengan lebih dari setengah kasus

COVID-19 yang dilaporkan. Lima negara itu mewakili 28% dari populasi global, menurut analisis Reuters.

Dunia membutuhkan waktu 11 bulan untuk mencatat 50 juta kasus pertama pandemi, dibandingkan dengan hanya tiga bulan hingga kasus menjadi dua kali lipat menjadi 100 juta.

Sekitar 56 negara telah mulai memvaksinasi warganya untuk mencegah virus corona, memberikan setidaknya 64 juta dosis. Israel memimpin dunia dalam vaksinasi per kapita, menyuntik 29% populasinya dengan minimal satu dosis.

Amerika Serikat

Dengan lebih dari 25 juta kasus, Amerika Serikat memiliki 25% dari semua kasus COVID yang dilaporkan meskipun hanya menyumbang 4% dari populasi dunia.

Amerika Serikat memimpin dunia dalam jumlah rata-rata harian kematian baru yang dilaporkan, dihitung satu dari setiap lima kematian yang dilaporkan di dunia setiap hari.

Dengan hanya di bawah 425.000 kematian, Amerika Serikat telah melaporkan kematian hampir dua kali lebih banyak daripada Brasil, yang memiliki jumlah kematian tertinggi kedua di dunia.

Eropa

Sebagai wilayah yang paling parah terkena dampak di dunia, Eropa saat ini melaporkan empat hari dan telah melaporkan hampir 30 juta kasus sejak pandemi dimulai.

Inggris pada hari Selasa mencapai 100.000 kematian.

Wilayah Eropa Timur, termasuk negara-negara seperti Rusia, Polandia, dan Ukraina, berkontribusi pada hampir 10% dari semua kasus Covid-19 global.

Meskipun sudah mendapatkan kesepakatan untuk pasokan vaksin sejak awal, banyak negara Eropa meng-

hadapi penundaan pengiriman dari Pfizer Inc dan AstraZeneca Plc.

Asia dan Afrika

Di India, negara dengan jumlah kasus tertinggi kedua, infeksi menurun, dengan rata-rata hampir 13.700 infeksi baru dilaporkan setiap hari, sekitar 15% dari puncaknya.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengatakan pada Jumat India sepenuhnya bergantung pada pasokan vaksin virus korona karena negara terpadat kedua di dunia menyuntik lebih dari 1 juta orang dalam waktu sepekan sejak memulai kampanye vaksinasinya.

Tiongkok menghadapi gelombang kasus lokal terburuk sejak Maret tahun lalu. Tiongkok baru-baru ini menandai peringatan pertama penguncian virus korona pertama di dunia di pusat kota Wuhan.

Ketika negara-negara yang lebih kaya berpacu dengan kampanye vaksinasi massal, Afrika masih berjuang mendapatkan pasokan karena bergulat dengan kekhawatiran tentang varian virus yang lebih

menular yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan dan Inggris.

Menurut penghitungan Reuters, negara-negara Afrika memiliki hampir 3,5 juta kasus dan lebih dari 85.000 kematian.

Varian baru Afrika Selatan, juga dikenal sebagai 501Y.V2, disebut 50% lebih menular dan telah terdeteksi di setidaknya 20 negara.

Presiden AS Joe Biden akan memberlakukan larangan bagi sebagian besar warga negara non-AS yang memasuki AS yang baru berada di Afrika Selatan mulai Sabtu. Langkah ini untuk menahan penyebaran varian baru Covid-19 dari Afrika Selatan.

Australia dan Selandia Baru bernasib lebih baik daripada kebanyakan negara maju lainnya selama pandemi melalui penutupan perbatasan yang cepat, penguncian, karantina hotel yang ketat untuk pelancong dan tes yang luas serta jarak sosial. "Kami mengendalikannya virus di sini di Australia, tetapi kami ingin meluncurkan vaksin itu," papar Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg. ● tom

Donald Trump Buka Kantor di Florida Usai tak Jadi Presiden

WASHINGTON(IM) - Donald Trump telah membuka kantor di Florida yang akan menanganai tugasnya sebagai mantan presiden Amerika Serikat dan berusaha untuk melanjutkan agenda

pemerintahannya. "Kantor akan bertanggung jawab untuk mengelola korespondensi, pernyataan publik, penampilan, dan kegiatan resmi Trump untuk memajukan kepentingan Amerika Serikat dan untuk menjalankan

agenda pemerintahan Trump sebelumnya melalui advokasi, pengorganisasian, dan aktivisme publik," kata sebuah pernyataan.

Pengumuman tentang pembukaan kantor Trump di Florida itu muncul pada hari yang sama

ketika Dewan Perwakilan Rakyat AS mengirimkan kepada Senat sebuah klausul untuk pemakzulan Trump.

Dewan Perwakilan Rakyat AS menuduh Trump dalam pidatonya telah menghasut para

pendukungnya untuk tindakan pemberontakan sebelum serangan mematikan di gedung Capitol pada 6 Januari. Sidang Senat AS untuk perhal tersebut diperkirakan akan dimulai pada 9 Februari. ● ans

PM Inggris Minta Maaf Angka Kematian Covid-19 Tembus 100 Ribu Orang

INGGRIS (IM) - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menyampaikan belasungkawa terdalam kepada pihak keluarga yang telah kehilangan lebih dari 100.000 akibat Covid-19.

Boris mengatakan sangat menyesal atas setiap nyawa yang hilang tadi malam ketika Inggris mencatat 100.000 kematian akibat virus korona.

Melalui konferensi pers, Boris mengatakan dia mengambil tanggung jawab penuh untuk setiap tindakan yang diambil Pemerintahnya dalam pandemi. "Pada hari ini saya harus benar-benar mengulangi bahwa saya sangat menyesal atas setiap nyawa yang telah hilang dan, tentu saja, karena saya adalah Perdana Menteri, saya bertanggung jawab penuh atas semua yang telah dilakukan Pemerintah," terangnya dengan wajah sedih.

"Apa yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa kami benar-benar melakukan semua yang kami bisa, dan terus melakukan semua yang kami bisa, untuk meminimalkan kehilangan nyawa dan meminimalkan penderitaan dalam tahap yang sangat, sangat sulit, untuk negara kita," jelasnya, dikutip Daily Mail.

"Dan kami akan terus melakukan itu, sama seperti setiap pemerintah yang terkena dampak krisis ini di seluruh dunia terus melakukan hal yang sama," lanjutnya.

Dia bersikeras para men-

teri telah melakukan semua yang kami bisa untuk membatasi korban jiwa tetapi mengakui sulit untuk menghitung kesedihan di balik jumlah korban tewas. Inggris adalah negara pertama di Eropa yang mencapai tonggak sejarah korban kematian Covid-19 yang cukup tinggi.

Boris menggambarkan angka kematian ini sebagai kehilangan nyawa yang mengerikan dan tragis. Setiap korban adalah ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak laki-laki, anak perempuan atau kakek nenek. Dan dia mengakui bahwa banyak kerabat yang berduka bahkan tanpa kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal.

Boris mengatakan negaranya akan memiliki waktu untuk belajar, merenungkan dan memperbaiki di akhir krisis, yang sekarang terlihat berkat peluncuran vaksin.

Dia menjelaskan negaranya akan bersatu untuk mengingat semua orang yang hilang, dan untuk menghormati kepahlawanan tanpa pamrih dari semua orang di garis depan yang memberikan hidup mereka untuk menyelamatkan orang lain.

Sementara itu, Kepala Petugas Medis Inggris mengatakan jumlah kasus turun dengan cepat. Yakni turun dari 68.000 kasus yang tercatat pada 7 Januari menjadi lebih dari 20.000 kemarin. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak Desember tahun lalu. ● gul

Didakwa Korupsi, Saudara Wapres Iran Divonis 2 Tahun Penjara

TEHERAN (IM) - Saudara laki-laki wakil presiden Iran dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas tuduhan korupsi. Hukuman itu diumumkan Kementerian Kehakiman Iran melalui jejaring resminya, Selasa (26/1).

Juru Bicara Kementerian Kehakiman Iran, Gholamhossein Esmaili mengatakan bahwa vonis untuk Mehdi Jahangiri, saudara laki-laki Eshaq Jahangiri, sudah final dan tidak bisa diajukan banding.

Mahdi Jahangiri adalah anggota dewan direksi Kamar Dagang Teheran dan juga pendiri bank swasta Gardeshgari Bank. Esmaili mengatakan tuduhan terhadap bankir itu termasuk penyelundupan uang

sebanyak 607.100 euro dan USD108.000. Mahdi Jahangiri juga diperintahkan mengembalikan uang itu dan didenda empat kali lipat jumlah yang dipersoalkan.

Jahangiri ditangkap pada Oktober 2017 dan dibebaskan dengan jaminan pada Maret 2018, sementara menunggu persidangan. Beberapa detail dari kasus tersebut telah terungkap ke publik, meskipun saudaranya Eshaq Jahangiri dikutip pada saat penangkapan mengatakan bahwa penahanan Mahdi sudah dapat diperkirakan dan bahwa dia berharap semua orang akan diperlakukan sama dalam mencari keadilan.

Pada Oktober 2019, saudara laki-laki Presiden Hassan Rouhani, Hossein Fereidoun, dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan melakukan sejumlah pelanggaran keuangan terhitung sejak 2016.

Tuduhan terhadap Fereidoun diajukan oleh kelompok garis keras yang mendominasi Kementerian Kehakiman di Iran. Iran pada masa lalu juga memenjarakan para sekutu sejumlah mantan presiden dengan tuduhan serupa.

Ketegangan antara Rouhani dan kelompok garis keras Iran meningkat lebih lanjut setelah mantan Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dan meningkatkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Teheran. ● tom



UNJUK RASA GURU, DOSEN DAN PELAJAR PERANCIS

IDN/ANTARA

Guru sekolah, dosen dan pelajar Perancis berdemonstrasi menuntut kondisi untuk belajar dan bekerja yang lebih baik, pekerjaan dan kenaikan gaji di Nanter sebagai bagian dari mobilisasi di dalam Perancis, saat penyebaran penyakit virus korona (COVID-19), Selasa (26/1). Slogan bertuliskan "Kalian tidak akan mengunci kemarahan kami".

Rusia dan Iran Tegaskan Pentingnya Pulihkan Kesepakatan Nuklir

MOSKOW(IM) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov bertemu Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di Moskow pada Selasa (26/1) waktu setempat.

Keduanya menekankan perlunya memulihkan kesepakatan nuklir Iran. Mereka juga membahas masalah-masalah utama kebijakan luar negeri.

"Hari ini, salah satu masalah utama adalah tugas menyelamatkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tentang penyelesaian program nuklir Iran," ungkap Lavrov dalam perundingan dengan Zarif, menurut pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia.

Kami, bersama Iran, memiliki minat yang tulus untuk mengembalikan semua penandatanganan JCPOA untuk implementasi penuh kewajiban mereka," papar dia.

Lavrov mengungkapkan harapan bahwa upaya yang saat ini ditujukan untuk pelestarian kesepakatan nuklir akan membuahkan hasil dan Amerika Serikat (AS) akan kembali melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 tentang JCPOA.

JCPOA dicapai pada 2015 antara Iran dan P5 + 1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, China, plus Jerman) dan Uni Eropa.

Teheran setuju membatalkan sebagian program senjata nuklirnya dengan imbalan pengurangan sanksi ekonomi. Pada 2018, Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan itu dan menjatuhkan sanksi kepada Iran, setelah itu Teheran berhenti menerapkan sebagian dari kewajibannya sesuai JCPOA. ● gul

PBB Masih Khawatir Nasib Perdagangan Yaman Meski AS Melunak pada Houthi

NEW YORK(IM) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih mendengungkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan berencana membatalkan atau menangkahkan bisnis dengan Yaman meskipun ada keputusan Amerika Serikat untuk mengizinkan semua transaksi dengan gerakan Houthi.

"Mengingat langkah (AS) ini tidak menyelesaikan ketidapastian yang mendasarinya," ungkap juru bicara PBB Stephanie Dujarric dilansir Reuters.

Keputusan ini muncul saat Washington meninjau kebijakan pemerintahannya era Donald Trump pada Houthi yang ditetapkan organisasi teroris asing. "Dengan jutaan warga sipil menghadapi risiko kelaparan, Yaman bahkan tidak mampu menghadapi gangguan sementara dalam aktivitas komersial dan belum jelas apakah izin baru akan mencegah gangguan semacam itu," papar Dujarric.

"Kami terus menyerukan pencabutan ketetapan itu atas dasar kemanusiaan," ungkap dia. Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam pekan lalu, sehari sebelum Presiden Joe Biden menjabat pada Rabu.

Saat itu sudah muncul peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai kelompok bantuan bahwa hal itu akan mendorong Yaman ke dalam krisis kelaparan skala besar. Langkah Trump itu mem-

bekukan aset Houthi yang terkait dengan AS, melarang warga AS berbisnis dengan Houthi, dan menjadikannya kejahatan untuk memberikan dukungan atau sumber daya kepada Houthi.

Pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan langkah Trump itu akan menak-nakuti perdagangan komersial di Yaman, yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor.

Tindakan Trump juga menciptakan celah yang tidak dapat diisi oleh operasi kemanusiaan terlepas dari pengecualian untuk bantuan kemanusiaan AS.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% rakyatnya membutuhkan bantuan.

"Sudah terjadi, sekitar 50.000 orang pada dasarnya kelaparan hingga mati. 5 juta orang lainnya hanya satu langkah di belakang mereka," ujar kepala bantuan PBB Mark Lowcock kepada Dewan Keamanan awal bulan ini.

Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi. Perang itu secara luas dianggap sebagai konflik proksi antara sekutu AS, Arab Saudi dan Iran. Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan rakyat Yaman juga diperburuk keruntuhan ekonomi dan pandemi Covid-19. ● ans



UNJUK RASA DI ROTTERDAM - BELANDA

Polisi memblokir jalan saat berlangsung unjuk rasa menentang pembatasan yang diterapkan untuk menekan laju sebaran virus corona (COVID-19) di Rotterdam, Belanda, Selasa (26/1).

AS dengan Tegas Dukung Solusi Dua Negara Israel dan Palestina

WASHINGTON(IM) - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina dan akan membatalkan beberapa keputusan Donald Trump. Pelaksana Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills meyakinkan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (26/1) waktu setempat.

Palestina menginginkan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya. Semua wilayah itu direbut Israel pada 1967. Namun, sesuai proposal perdamaian yang gagal oleh mantan Presiden Donald Trump, Washington akan mengakui permukiman Yahudi di wilayah pendudukan sebagai bagian dari Israel.

Richard Mills mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa, "Washington akan mendesak Israel dan Palestina untuk menghindari langkah-langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit, seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, pembongkaran, hasutan untuk melakukan kekerasan dan memberikan kompensasi bagi individu yang dipenjara atas tindakan terorisme."

"Kami berharap akan mungkin untuk mulai bekerja perlahan-lahan membangun kompetensi di kedua sisi untuk menciptakan lingkungan di mana kita mungkin sekali lagi dapat membantu memajukan solusi," papar Mills kepada 15 anggota Dewan Ke-

amanan PBB.

Dia mengatakan, pemerintahan Biden bermaksud mengembalikan bantuan Palestina dan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington. Di era Trump, Washington memotong sekitar USD360 juta dana tahunan untuk badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina (UNRWA). "Kami tidak melakukan langkah-langkah ini untuk mendukung kepemimpinan Palestina," papar Mills.

"Bantuan AS bermanfaat bagi jutaan warga Palestina biasa dan membantu melestarikan lingkungan yang stabil yang bermanfaat bagi warga Palestina dan Israel," ujar dia. Dia menambahkan Washington dengan teguh mendukung aliansinya Israel dan akan terus melawan bias apa pun terhadap negara itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan internasional lainnya. Mills menjelaskan, pemerintahan Biden akan terus mendesak negara-negara lain menormalkan hubungan dengan Israel, meski mengakui itu "bukan pengganti perdamaian Israel-Palestina."

Dalam apa yang secara luas dipandang sebagai salah satu dari sedikit keberhasilan kebijakan luar negeri Trump, Washington mendapatkan perjanjian akhir tahun lalu oleh empat negara Arab yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko untuk mulai menormalisasi hubungan dengan Israel. ● gul